

Judul : Skema TPG jadi bulanan, komisi X: guru bisa tersenyum
Tanggal : Jumat, 09 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Skema TPG Jadi Bulanan Komisi X: Guru Bisa Tersenyum

FOTO IG PANGUDI



Kurniasih Mufidayati

KOMISI X DPR menyoroti rencana Pemerintah mengubah skema pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) menjadi bulanan pada 2026. Kebijakan ini dinilai bisa memberi jaminan kepastian ekonomi guru. Pasalnya, skema per triwulan yang berlaku sebelumnya kerap menyulitkan guru memenuhi kebutuhan hidup rutin.

Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati mendukung langkah yang diambil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu. Dia bilang, perubahan dari sistem rapel tiga bulanan ke pencairan bulanan mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi riil guru di lapangan.

"Kami menyambut positif langkah ini. TPG bulanan adalah terobosan tata kelola yang sudah lama dinantikan," ujar Kurniasih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Dia menegaskan, jika skema itu telah terealisasi, guru tidak lagi terjebak praktik menutup kebutuhan bulanan dengan utang sambil menunggu rapelan cair. Kepastian arus kas bulanan akan berdampak langsung pada ketenangan dan fokus guru dalam mendidik siswa.

"Niat baik ini harus kita kawal bersama, karena peningkatan kesejahteraan bukan hanya soal menaikkan angka, tapi juga soal

memanusiakan mekanisme," kata politikus PKS itu.

Kurniasih mengingatkan agar kebijakan ini tidak tersendat di daerah. Jangan sampai ketika regulasinya sudah diubah menjadi bulanan, tapi dananya justru mengendap di Pemerintah Daerah. Untuk itu, harus ada pengawasan dan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri serta Pemda. "Mari kita jadikan 2026 sebagai tahun di mana guru-guru bisa tersenyum setiap bulan, bukan setiap tiga bulan," ucapnya.

Senada, Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian berharap kebijakan pencairan TPG tiap bulan bisa membantu memenuhi kebutuhan kesejahteraan guru. Mekanisme ini membuat guru tidak lagi menunggu lama seperti pada sistem pencairan triwulanan.

Namun, lanjutnya, kebijakan ini pada dasarnya belum memperbaiki arus penerimaan, karena belum ada peningkatan besaran tunjangan. Selain persoalan administratif, perbaikan validitas data, atau ketimpangan kondisi guru di daerah, masalah besaran tunjangan juga perlu diselesaikan.

Dia bilang, agar kebijakan pencairan bulanan ini berjalan efektif dan adil, mekanismenya harus dilakukan secara konsisten, khususnya di daerah. Pengawasan perlu bertumpu pada sistem digital yang terintegrasi untuk meminimalkan keterlambatan dan penyimpangan. "Selain itu, Pemda dan inspektorat harus berperan aktif dalam memastikan proses berjalan sesuai ketentuan," tegasnya.

Sementara, Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan, pencairan TPG dilakukan setiap bulan mulai 2026. Perubahan skema ini jadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan kepastian kesejahteraan guru setelah sebelumnya hanya bisa mentransfer setiap tiga bulan. ■ PYB